

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai perempuan selalu menjadi topik yang menarik di bicarakan oleh berbagai kalangan. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa topik tentang perempuan selalu menarik untuk diperbincangkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini kajian tentang masalah perempuan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Intensitas diskusi, seminar, dan penelitian merefleksikan meningkatnya kesadaran berbagai kalangan akan pentingnya kedudukan dan peran perempuan dalam proses transformasi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam proses transformasi masyarakat juga tidak lepas dari teori sosial yaitu teori gender.

Seiring dengan semakin besarnya akses kaum perempuan dalam berbagai bidang, kesadaran perempuan akan persamaan hak dan kedudukan dengan kaum laki-laki semakin terbuka, meskipun demikian tujuan akhir dari cita-cita kaum perempuan untuk memperoleh persamaan tersebut masih memerlukan waktu yang panjang karena selama berabad-abad yang lalu masyarakat tumbuh dalam kebudayaan yang di dasarkan pada kekuasaan kaum laki-laki. Capra mengatakan bahwa selama 300 tahun terakhir, peradaban Barat dan kebudayaan-kebudayaan pendahulunya, begitu pula kebudayaan yang lainnya telah di dasarkan atas sistem filsafat, sosial politik dimana pria dengan kekuatan, tekanan langsung melalui ritual, tradisi, hukum, bahasa, adat

kebiasaan, etika, pendidikan dan pembagian kerja menentukan peran apa yang boleh dan tidak boleh di mainkan oleh wanita dan dimana wanita di anggap lebih baik dari pria.¹¹

Budaya patriarchal tersebut telah membentuk suatu sistem yang sulit untuk dipahami karena sifatnya yang menembus ke segala arah. Sistem-sistem inilah yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran mendasar tentang hakekat manusia bahkan doktrin-doktrinnya diterima sedemikian universal sehingga tampak sebagai hukum alam. Kepercayaan bahwa laki-laki lebih kuasa menentukan segala sesuatu dalam kehidupan sosial telah menonjolkan perempuan pada posisi yang tergantung kepada laki-laki. Dengan keadaan seperti itu, perempuan sering di identikan sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki sebagai makhluk yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul suatu anggapan bahwa perempuan lebih tepat bekerja di sektor domestik yaitu mengurus segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga, sedangkan laki-laki tepat bekerja pada sektor publik. Pembagian peranan berdasar jenis kelamin tersebut terus berlanjut karena sejak dini pada diri anak-anak telah ditanamkan ajaran-ajaran seperti ibu pandai memasak, ayah bekerja di sawah. Ajaran-ajaran tersebut telah mengendap pada pemikiran anak-anak lewat sosialisasi yang termuat dalam buku bacaan anak-anak Sekolah Dasar.² Pengalaman anak-anak di rumah juga mendukung dan memperkuat pengetahuan mereka. Anak-anak mulai

¹ Lihat dalam Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 1999.

² Cahya Yuana, *Respon Elit Muhammadiyah Terhadap Dinamika Wanita*, Jurusan Sosiologi, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2000.

bisa membedakan antara tugas laki-laki dan tugas perempuan. Sosialisasi seperti itu merupakan hasil penupukan masyarakat melalui sistem pendidikan.

Dikotomi publik dan domestik yang digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan pemisahan jenis kelamin telah menciptakan jarak bagi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosialnya. Satu memiliki status yang lebih tinggi dari pada yang lain. Adanya keberpihakan pada laki-laki membuat perempuan terpenjara dalam sektor domestik yang mengisolirnya dari kehidupan publik.

Kebudayaan yang didasarkan pada laki-laki ini semakin disuburkan oleh adanya sistem patriarchal dalam masyarakat yang didukung oleh ideologi familialisme. Ideologi familialisme yang menekankan peranan perempuan sebagai istri dan ibu, merasuk dan mempengaruhi cara pandang maupun persepsi perempuan dan laki-laki terhadap pengalaman kesehariannya.³ Secara ideal masih terdapat anggapan bahwa peran utama perempuan ada di sekitar rumah tangga dan tugas-tugas domestik. Aktivitas perempuan dalam sektor lain seperti sektor produksi di anggap sebagai tugas sekunder. Ketimpangan gender yang berakibat pada domestikasi kaum perempuan nampak jelas sehingga kesetaraan gender jarang muncul dalam relasi sosial di dalam masyarakat. Nilai-nilai dominasi laki-laki di langgengkan dalam institusi-institusi sosial seperti politik, pendidikan, ekonomi dan kepercayaan.

Pembagian peranan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan ini memiliki pengaruh sangat besar terhadap keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Dalam menentukan tatanan kehidupan bermasyarakat

³ Siti Kusujiarti, *Antara Ideologi dan Transkrip Tersembunyi : Dinamika Hubungan Gender dalam Masyarakat Jawa* dalam Irwan Abdullah Sangkan Paran Gender, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.

kaum pria masih mendominasi. Perempuan dipojokkan oleh anggapan bahwa ia tidak mampu untuk mengambil keputusan tentang hal-hal semacam tersebut diatas. Namun pada kenyataannya, adakalanya wanita diikutsertakan atau bahkan justru yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa dilihat dari sebuah kasus di Minahasa sekitar tahun 1930 dimana perempuan akhirnya diminta turun tangan menyelesaikan permasalahan tanah karena laki-laki tidak mampu menyelesaikannya. Disini perempuan diakui dan terbukti bahwa mereka mempunyai kemampuan dan kekuatan apabila diberi kesempatan.⁴

Terbukanya akses kaum perempuan terutama dalam dunia pendidikan membuka peluang bagi kaum perempuan untuk mulai masuk dalam bursa tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) yang semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran pada tahun 1980 TPAK adalah 33,64%. Tahun 1985 meningkat menjadi 37,59%. Tahun 1990 menjadi 38,79% dan pada tahun 1996 ialah 44,62%.⁵ Meskipun semakin banyak perempuan yang terlibat dalam dunia kerja, perempuan masih tetap berada dibawah kontrol laki-laki. Perempuan dalam bursa kerja dianggap sebagai tenaga kerja dengan upah yang relatif rendah, lain halnya dengan laki-laki. Kenyataan membuktikan bahwa perempuan tidak dapat lepas dari subordinasi laki-laki. Bagaimana ketika perempuan berhadapan dengan dunia kerja dalam dunia publik milik laki-laki, ia terlibat dalam dunia kerja yang bergender.

⁴ Siti Kusujarti, *ibid.*

⁵ Lihat dalam Agnes W, *Relasi Gender dalam Tugas Keperawatan*, Skripsi Jurusan Sosiologi Fisipol UGM, 2000.

Meningkatnya tenaga kerja perempuan dari tahun ke tahun, memberi kegembiraan tersendiri karena perempuan tidak hanya bekerja di sektor domestik tapi telah merambat kewilayah public termasuk pers. Seperti diketahui bahwa institusi yang bernama pers adalah institusi yang paling efektif sebagai penyebar informasi. Sebagai sarana yang efektif, pers bahkan mampu menjadi kekuatan keempat (*the fourth power*) yang cukup disegani.

Pers Indonesia mengalami pasang surut dalam sejarahnya. Tahun 1998 merupakan tonggak awal dari bangkitnya pers Indonesia setelah terlepas dari lingkungan rezim otoritarian orde baru, peristiwa ini ditandai dengan bergulirnya Orde Reformasi. Di Era Reformasi ini kran-kran yang tersumbat mulai dibuka kembali. Inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat mengalami euforia reformasi. Euforia reformasi telah melahirkan berbagai tuntutan akan sebuah kebebasan atau dengan kata lain menginginkan demokratisasi dalam berbagai bidang. Wajar memang jika masyarakat menginginkan sebuah kebebasan karena selama hamper 32 tahun terpasung. Hal itu terjadi pula pada dunia komunikasi kita. Tuntutan akan kebebasan komunikasi semakin mengedepankan seiring dengan adanya globalisasi informasi.

Era Reformasi yang sekaligus melahirkan Era kebebasan Pers di Indonesia telah memberi angin segar bagi industri media. Kebebasan Pers tercermin dengan kebijakan atau deregulasi industri media antara lain pencabutan permempen tentang SIUUP. Sebagai gantinya, dikeluarkan SK tentang kemudahan SIUUP. Situasi politik telah memberi ruang gerak bagi Pers untuk ambil bagian ditengah kebebasan Pers itu karena pengurusan tentang

SIUPP sangat rendah. Yang terjadi kemudian ialah munculnya berbagai macam media baik elektronik maupun cetak yang ikut meramaikan kebebasan Pers pasca orde baru. Kemudahan mengenai kepengurusan SIUPP ini terbukti dengan banyaknya SK yang dikeluarkan oleh Deppen menyesul paket informasi di bidang Pers tanggal 5 Juni 1998. Hingga 15 April 1999 telah diterbitkan 852 SIUPP oleh Deppen.⁶ Dari SIUPP yang diterbitkan tersebut, 415 SIUPP adalah penerbitan di wilayah Jakarta. Walaupun sebagian besar media-media ini akhirnya rontok di tahun pertama. Banyak faktor yang menyebabkan matinya media-media tersebut yakni adanya faktor internal dan eksternal, diantaranya ialah a) latar belakang pendirinya karena ikut-ikutan meramaikan euforia kebebasan Pers dan kemudahan ijin, tapi manajemennya tidak profesional, b) kejenuhan pasar terhadap isu-isu yang cenderung seragam, c) kesulitan keuangan. Hasil survey jurnal media WATCH and Consumer Center, edisi 2 Th 1-Juni 2000 hal 19-20 bahwa 186 media masih terbit, 158 sudah tidak terbit dan 354 tidak diketahui datanya dari 812 SIUPP yang diterbitkan oleh Deppen per 23 September 1999.

Kebangkitan Pers Indonesia pasca orde baru, secara tidak langsung memberi kesempatan kepada para jurnalis untuk berkecimpung di dalamnya termasuk juga para jurnalis perempuan. Namun, dibalik pesatnya perkembangan media terutama media cetak Pasca Orde Baru ini masih terdapat juga masalah ketidakadilan gender dalam media. Alangkah lebih mengembirakan apabila perkembangan media itu dibarengi dengan wacana dan kajian tentang media

⁶ Laporan Tahunan 98/99 LPSSA Aji dalam Abdul Wahid, Pers dan Kekerasan Etnis, Fisipol UGM, 2000.

yang sensitif gender. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa manifestasi ketidakadilan gender masih mewarnai perkembangan media massa di Indonesia.⁷

Bila dicermati lebih lanjut, regulasi mengenai Pers masih berkuat pada seputar kebebasan. Sedangkan dalam hubungan dengan isu gender masih sangat minim. Kondisi ini tentu berkaitan erat dengan Negara yang masih subur dengan budaya patriarki. Budaya semacam ini seringkali turut berperan dalam menempatkan kaum perempuan sebagai sosok yang tersubordinasi dan hidup dibayang-bayang kaum laki-laki yang bersifat mendominasi, sehingga kaum perempuan berada pada posisi pinggiran atau periphery. Inilah yang menyebabkan kebijakan Negara masih bias gender dan isu mengenai gender di dalam regulasi pers masih minim. Dan ini tidak terlepas dari kebijakan perusahaan media yang masih memprioritaskan laki-laki sebagai posisi sentralnya, baik dari wartawan masih pengambil kebijakan.⁸ hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah manusia yang berperan, berpengaruh dan menentukan di dalam realitas masyarakat hanyalah kaum laki-laki.

Saat ini daftar perempuan yang mengisi Sejarah bangsa dan peradaban mengingat luar biasa tetapi hal ini belum menunjukkan hal yang signifikan dalam pemberitaan Pers media cetak. Pemberitaan perempuan sebagai pemimpin kemudian mengenai gerakan perempuan, LSM-LSM perempuan, keberhasilan kaum perempuan dan sebagainya sudah banyak diberitakan dalam media. Namun, dapat dilihat, masih banyak dilihat juga bagaimana perempuan di media massa hanya dijadikan komoditi atau objek. Tengoklah bagaimana perempuan

⁷ Lihat dalam Mukhotib MD, *Mengupas Jurnalisme Sensitif Gender*, PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

⁸ *Ibid*

diproyeksikan dalam media baik sebagai iklan, sampul, maupun berita yang masih mengeksploitasi perempuan dan hanya memakai wajah dan bentuk badan perempuan sebagai daya tariknya.

Pemberitaan perempuan dalam pers selama ini masih diskriminasi gender yang dapat dilihat dari fakta bahwa perempuan diperlakukan secara negatif dan subordinatif dimana proporsi liputan perempuan dan laki-laki tidak berimbang walaupun perempuan digambarkan dalam lingkup publik, citra dan variasi model perempuan sangatlah sempit dan stereotip. Lebih jauh, perempuan baik sebagai objek maupun sebagai subjek berita, muncul sebagai makhluk yang jarang bersentuhan dengan isu-isu sosial, politik dan ekonomi yang besar dan penting. Pemberitaan perempuan di media kebanyakan mengenai perempuan sebagai objek maupun sebagai korban. Disinilah inti persoalan media dan gender, terutama dalam kasus-kasus kekerasan, pelecehan, eksploitasi. Fakta gender dalam media, lebih dari bagaimana kepentingan perempuan sebagai manusia terakomodasi, terwakili nurani, dan terberdayakan (secara hak-hak mendapat perlindungan dan pemberdayaan). Sementara itu banyak media massa cenderung memandang fakta gender sebagai obyek sensasioanalitas pemberitaan dan bahkan lebih sering dikemas demi kepentingan bisnis media itu sendiri, tanpa pernah melihat nurani. Sebuah contoh nyata, bagaimana pengekspos berita perkosaan yang diekspos sedemikian rupa, sehingga nilai kemanusiaan menjadi bias. Yang ada hanya berita sensasional yang menyinggung nilai-nilai hak asasi perempuan.⁹

⁹ May Lan, *Pers, Negara & Perempuan*, Yogyakarta, Kalika, 2002.

Kaum perempuan dalam dunia Pers masih sering disebut sebagai orang asing atau *the other*. Irwan Abdullah mengatakan bahwa dalam lembaga penerbitan Pers masih terkesan adanya semacam pengingkaran sosial terhadap keberadaan perempuan. Manifestasi ini tampak pada klaim bahwa dunia pers adalah milik kaum laki-laki. Perempuan dianggap tidak akan mampu berada dalam medan keras profesi jurnalisme. Berkembangnya anggapan seperti itu bukan secara kebetulan, melainkan memiliki latar belakang sosio-kultur yang kuat. Realitas sosial dari dahulu hingga kini memberikan petunjuk adanya perbedaan peran serta anatara kaum laki-laki dan perempuan. Anggapan bahwa perempuan lebih lemah, emosional, kodrat perempuan sebagai sekedar pelengkap dan karena itu hanya mungkin mengembangkan diri secara penuh sebagai istri dan ibu rumah tangga, tugas perempuan hanya untuk mengabdikan pada suami dan bertanggungjawab pada pertumbuhan-pertumbuhan anak-anak, perempuan hanya sebagai *konco wingking* suami, masih merupakan realitas keseharian yang biasa disaksikan pada masyarakat kita.¹⁰ Dengan kata lain, masih ada kecenderungan memandang perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat kita. Kecenderungan melihat peran, kedudukan dan kodrat perempuan masih rendah, lemah bahkan kurang mampu bukan hanya berlangsung pada tingkat kesadaran, tetapi juga merasuk pada berbagai aspek kehidupan yang lebih obyektif dan formal, tak terkecuali dalam instansi pers.

Sejak berabad-abad lalu dunia telah dipenuhi dengan pandangan-pandangan yang bias tentang perempuan. Pandangan bias ini, berpangkal dari

¹⁰ Ashadi Siregar (Peny), *Memasuki Dunia Kerja Laki-laki dalam Media dan Gender*, Yogyakarta, LP3Y, 1999, hal 169.

hasrat laki-laki menguasai kontrol tubuh perempuan, terutama kapasitas seksual dan reproduksinya. Laki-laki dengan segala upaya terus mendesak perempuan hanya menerima peran sebagai ibu rumah tangga. Sedemikian hegemoniknya upaya laki-laki (patriarki) tersebut, sehingga keyakinan gender sudah tertanam di dalam alam bawah sadar bahwa perempuan menjadi obyek yang inferior di hadapan subyek laki-laki yang superior.¹¹

Kaitannya dengan pers termasuk di dalamnya surat kabar, bias gender ternyata merambat ke dunia jurnalistik dan secara sadar atau tidak media turut andil dalam melanggengkan keyakinan gender yang tidak adil itu. Sehingga dalam kenyataan kita sulit menemukan peran publik yang dimiliki perempuan. Bila dicermati, setidaknya bias gender dalam dunia Pers dapat dilihat dari dua sisi.¹² Pertama, dari sisi minimnya kualitas jurnalistik perempuan yang jumlahnya sangat tidak sebanding dengan jurnalistik laki-laki. Dari data PWI dapat dilihat bahwa jumlah wartawati Indonesia 8,6% sedangkan wartawan 91,4%. Hal ini bukan disebabkan karena perempuan tidak mampu menggeluti profesi tersebut tetapi karena adanya semacam larangan tidak tertulis budaya Indonesia agar perempuan tidak memasukinya: ada klaim kantong-kantong maskulin untuk profesi ini. Jumlah jurnalis perempuan yang minim ini, harus pula menerima perlakuan tidak adil dari masyarakat maupun media. Konsekuensi dari minimnya perempuan yang menggeluti profesi ini mau tidak akan mempengaruhi pula terhadapnya minimnya kaum perempuan dalam bidang keredaksian. Akibatnya, perempuan pun banyak ditempatkan dalam pos-pos

¹¹ Lihat dalam Mukhotib, MD, *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*, PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹² *Ibid*

yang ringan atau “lunak” dan sering tidak diajak dalam pengambilan keputusan. Posisi perempuan tidak berada dalam posisi strategis. Memang ada beberapa perempuan duduk dalam posisi strategis namun itu dapat dihitung dengan jari dan posisinya belum cukup signifikan. Dengan keadaan seperti itu, posisi perempuan dalam struktur organisasi pers tetap di bawah dominasi laki-laki. Walaupun ada perempuan yang ditugaskan untuk meliput, biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang enak semacam tempat seminar. Wajar kemudian karier perempuan dalam pers menjadi tidak sekuat laki-laki yang kebanyakan menduduki posisi yang strategis dalam penerbitan pers. Posisi kaum perempuan yang dinomorduakan ini menjadikan perempuan sering kali tidak diajak dalam mengambil keputusan. Walaupun diajak dalam pengambilan keputusan, suara perempuan akan kalah dengan laki-laki. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan perempuan dalam politik keredaksian pers yaitu tawar menawar perempuan menjadi sangat lemah.

Kedua, ialah dari sisi kualitas pemberitaan mengenai kaum perempuan. Memang perempuan yang mendominasi pemberitaan di media massa, namun hal ini masih berputar pada dua hal. Pertama, sebagai iklan dari satu produk yang diperuntukkan untuk menggait minat konsumen laki-laki dan sekaligus sebagai sarana komoditi. Kedua, sebagai sumber berita sensasional yang lebih difungsikan sebagai strategi menaikkan omset usaha pemberdayaan perempuan. Pers dalam ini dikaitkan dengan bisnis dan kapitalisme. Kapitalisme media yang begitu dahsyat tidak bisa membendung dan banyak yang terhayut di dalamnya. Selain itu, bias gender yang kedua ini tentunya tidak lepas dari faktor yang

pertama yakni minimnya kaum perempuan dalam struktur organisasi keredaksian pers juga peran dan posisi perempuan yang selalu dianggap sebagai “*the other*” memang menghalangi perempuan untuk lebih maju terutama di dunia pers.

Karakteristik Rubrik-Rubrik *Kedaulatan Rakyat* sebagai koran yang terbit di Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya masih mempunyai karakteristik khusus yang tidak dipunyai oleh surat kabar lain. Dengan latar belakang keraton yang ada di Yogyakarta, maka penampilan *KR* atau *Kedaulatan Rakyat* terpengaruh juga mengenai penempatan berita sosial budaya. Surat kabar ini mempunyai ciri khusus yang tidak ada dalam surat kabar daerah lainnya. Karakteristik itu antara lain:

- a) Dalam penempatan berita khususnya berita daerah, Surat Kabar harian *Kedaulatan Rakyat* lebih menampilkan berita tentang masalah-masalah yang ada di kota Yogyakarta, dibanding masalah yang ada di Jawa Tengah atau propinsi yang lain. Tapi jika ada berita-berita aktual dan berbobot yang layak, besar kemungkinan akan dimuat di halaman ini, seperti berita dari luar Negeri, lebih-lebih jika berita itu berita Nasional dan daerah (propinsi lain). Pada halaman ini disudut kanan bawah ada spesifik berita yang tidak ada di koran lain, yaitu kolom sungguh-sungguh terjadi, dimana kolom ini menceritakan kejadian lucu, kocak yang dialami, ditulis, dan dikirim oleh pembaca.
- b) Lebih banyak menyajikan berita-berita mengenai masalah yang ada di dalam kota Yogyakarta, baik berita pembangunan, pendidikan, maupun yang lainnya.

- c) Lebih memberitakan pembangunan daerah-daerah diseputar kabupaten yang ada di daerah seputar DIY.
- d) Menempatkan berita-berita daerah jateng, DIY.
- e) Berita seputar perguruan tinggi di DIY dan Jateng, baik swasta maupun Negeri, juga kosa kata hari ini / ekbis.
- f) Disajikan karangan khas, Tajuk Rencana, pojok (berabe), juga susunan redaksi surat kabar harian *Kedaulatan rakyat*, pikiran pembaca, penganggalan, serta sekilass Manca Negara.
- g) Memuat berita, daerah Joglo Semar (Yogyakarta, Solo, Semarang), Iklan, dan melatih ingatan berhadiah, serta cerita silat.
- h) Menyajikan berita-berita hiburan dan rubrikasi serta iklan bioskop.
- i) Menyajikan iklan cilik.
- j) Memuat sambungan-sambungan Iklan Cilik.
- k) Memuat sambungan-sambungan halaman 1.
- l) Menempatkan berita-berita yang dianggap aktual di kalangan masyarakat dengan harapan agar yang disajikan dalam halaman ini menarik perhatian untuk dibaca dan biasanya dilengkapi dengan gambar-gambar untuk semakin menarik perhatian khalayak juga merupakan halaman sambungan dari halaman-halaman 1 dan lainnya.

Lebih jelas terhadap rubrikasi yang ada di *Kedaulatan Rakyat* yang terbuat dalam Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* yang sekarang yaitu:

1. Hal Ekbis : Hasan M Noor
2. Hal Panggung : Banny Kusumawan
3. Hal otomotif
4. Hal teknologi : Sobirin
5. Hal Laporan Khusus : Hasto Sutadi
6. Hal opini : Drs.Suhadi Sukarno SU
7. Hal mekarsari : Sutopo Sgh
8. Hal OR : Sulistyو Sutopo
9. Kandha Raharjo : Hari Sunanto
10. Hal pendidikan : Retno Wulandari
11. Hal manca Negara : Prabandari

Rubrikasi Khusus Hari Minggu

1. Rubrik/hal perbincangan : Fadmi Sustiwi
2. Hal rancang : Fauzi
3. Hal keluarga : Hanik Atfiati
4. Hal budaya : Jayadi Kastari
5. Hal foto : Eko Budiantoro
6. Hal kartun : Joko Santoso
7. Hal ragam : Aksan Susanto.

Alasan mengapa memilih pers surat khabar harian *Kedaulatan Rakyat* karena merupakan media informasi cetak yang sangat populer di dalam masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di Yogyakarta dan *Kedaulatan Rakyat* memiliki oplah terbanyak di daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* dalam komposisi perempuan dan laki-laki di dalam struktur organisasi keredaksian masih terdapat minimnya jurnalis perempuan yang ada di *Kedaulatan Rakyat* sendiri kemungkinan disebabkan karena individu-individu di dalamnya khususnya pengelola media masih menganut budaya patriarki. Paham patriarki ini menempatkan kaum laki-laki lebih unggul sehingga menjadikan kaum perempuan seakan tidak mampu artinya mereka belum dipercaya sepenuhnya apabila perempuan mampu menggeluti profesi seperti ini. Dalam paham ini melihat adanya ketidakseimbangan kaum perempuan dan laki-laki dalam peranannya yang sering disebut dengan Teori Gender.

Alasan lain yang mendorong peneliti mengambil studi kasus ini karena masih jarang para mahasiswa/mahasiswa melakukan penelitian tentang Gender di Dalam Keredaksian Pers itu sendiri.

Dari ilustrasi di atas, penulis akan mencoba mengetahui secara lebih mendalam bagaimana posisi perempuan dalam struktur organisasi keredaksian pers di *Kedaulatan Rakyat*, karena bukan tidak mungkin dalam dunia pers semacam surat kabar masih ada ketidakadilan Gender.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis mengangkat perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana posisi perempuan dalam politik keredaksian pers di Kedaulatan Rakyat?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka Tujuan penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana posisi perempuan dalam politik keredaksian pers di Kedaulatan Rakyat”

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis membedakan dua manfaat yang diharapkan lahir dari penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan mengenai gender khususnya di Kedaulatan Rakyat
 - b. Sebagai tambahan literatur bagi peneliti/penulis karya ilmiah yang relevan
 - c. Memberikan pemahaman/informasi bagi masyarakat di masa mendatang mengenai pranan gender.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY, mengenai konsep gender dalam politik keredaksian khususnya Kedaulatan Rakyat.
- b. Memberikan masukan kepada insan pers khususnya yang perempuan, bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berkiprah di dunia publik termasuk juga dalam politik kededaksian.
- c. Memberikan masukan kepada dunia pers agar dalam pemberitaan tidak bias gender.
- d. Meluruskan salah persepsi masyarakat dalam menilai dan memperlakukan gender.
- e. Memberikan wacana bagi perkembangan studi gender.

E. Kerangka Teori

E.1. Gender

E.1.1. Pengertian Gender

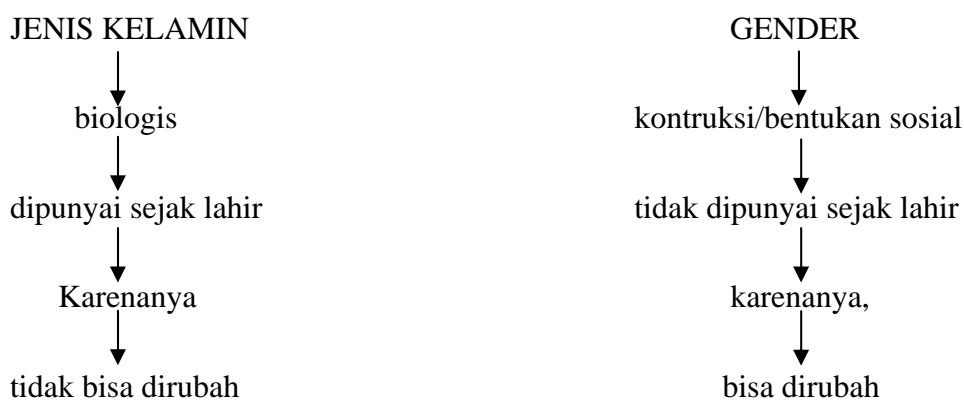
Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dan seks atau jenis kelamin karena terdapat pemahaman yang keliru ketika orang mengartikan gender dengan seks.¹³ Hal ini dilandasi karena kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kata sex dan gender dalam kamus memang tidak dibedakan secara jelas. Untuk memahami perbedaan seks dan gender bisa dimulai dengan mencoba melacak secara sederhana pelabelan terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam tulisan Mansour Fakih pengertian seks

¹³ Mansour Faki, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.

atau jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Singkatnya seks merupakan pelabelan yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, perempuan memiliki alat produksi, perempuan mengalami haid, perempuan menyusui, yang ketiga tidak mungkin bagi laki-laki. Dan sebaliknya bagi laki-laki memiliki jakun, sperma, yang hal tersebut tidak bisa dipertukarkan kepada perempuan. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Oleh karena itu, seks bersifat kodrati atau pemberian dari Tuhan atau dengan kata lain, seks dipahami sebagai pemaknaan terhadap jenis kelamin yang bersifat biologis, alamiah, dan tidak bisa dirubah dalam kondisi, situasi dan budaya serta tradisi apa pun. Artinya, pemahaman seks lantas tidak mengenal batas ruang dan waktu. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1

Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender



Sumber : Mansour Fakih, *Isu-isu dan Manifestasi Ketidakadilan Gender Dalam Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*, Yogyakarta : PMII IAIN Sunan Kalijaga.

Sedang konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial maupun cultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri dapat dipertukarkan, artinya laki-laki ada yang lemah lembut, emosional. Sementara kaum perempuan juga ada yang kuat, rasional. Gender bukanlah suatu kodrat tetapi merupakan konstruksi sosial dimana laki-laki dan perempuan hidup. Gender merupakan hasil konstruksi tradisi, budaya, agama dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu dan langsung membentuk karakteristik laki-laki maupun perempuan. Karena, itu gender tergantung pada nilai-nilai yang dianut masyarakat dan menentukan apa yang dilakukan perempuan dan laki-laki. Sehingga dengan demikian gender dapat diubah dalam situasi maupun kondisi tertentu. Jadi, semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ketempat lainnya maupun berbeda dari satu kelas ke kelas lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada dua macam jenis kelamin 1) jenis kelamin yang ditentukan Tuhan, ini yang disebut seks dan 2) jenis kelamin yang ditentukan oleh masyarakat, ini yang disebut gender. Dalam bahasa Inggris sex dan gender diartikan satu yaitu jenis kelamin. Dalam masyarakat muncul pemahaman tentang maskulin yang disandangkan pada laki-laki, yang kemudian dikonstruksikan sebagai pencari nafkah utama, bergerak di ruang publik dan

produktif. Disisi lain ada pemahaman feminisme yang dilabelkan kepada perempuan yang kemudian dikonstruksikan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga, bergerak diruang domestik dan memerankan reproduktif.¹⁴

Tabel 1.1

Perbedaan Kodrat Dan Konstruksi Dalam Analisis Gender

<p>Kodrat / ketentuan Tuhan Laki-laki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai jakun 2. Mempunyai penis 3. Dapat menghasilkan sperma 	<p>Konstruksi sosial Laki-laki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkasa 2. Tidak Emosional 3. Kepala Rumah Tangga 4. Rasional 5. Bisa Memipin
<p>Perempuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat melahirkan 2. Mempunyai vagina 3. Mempunyai payudara 4. Dapat menghasilkan sel telur 5. Mempunyai rahim 	<p>Perempuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemah lembut 2. Emosional 3. Keibuan 4. Tidak Rasional 5. Tugas Utamanya Mengurus Rumah Tangga.

Sejarah perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki terbentuk melalui proses yang panjang. Perbedaan gender dibentuk, disosialisasikan dan dikonstruksikan secara sosial kultural Melalui proses yang panjang tersebut, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan seolah-olah tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Misalnya saja mengenai urusan mendidik anak, merawat dan mengelola keindahan rumah sering dianggap sebagai kodrat wanita, padahal itu sesungguhnya adalah gender. Hal ini juga didukung oleh budaya Jawa yaitu mengenai konsep kias lima jari tangan yang

¹⁴ *Ibid*

tertuang dalam Serat Centhini. Ajaran tersebut menuturkan bahwa wanita harus berlaku sesuai dengan makna kias lima jari tangan yaitu.¹⁵ :

1. Jempol jari (ibu jari) artinya “ *pol ing iyas*”, wanita istri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami.
2. Penuduh (Telunjuk) berarti istri tidak boleh mempersolkan petunjuk suami.
3. Penunggul (jari tengah) berarti selalu meluhurkan suami dan menjaga martabatnya.
4. Jari manis berarti dalam melayani suami harus tetap manis air mukanya.
5. Jejentik (kelingking), artinya istri harus athak-ithikan (trampil dan banyak akal dalam pelayanannya kepada suami dan khendaknya tetap lembut).

Ada tiga aliran besar pemikiran yang berkembang dalam persoalan relasi perempuan dan laki-laki.¹⁶ Pertama, suatu aliran yang menganggap bahwa perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki merupakan perbedaan alamiah yang sama sekali tidak perlu dipersoalkan. Ketika relasi ini dipersoalkan akan terjadi kekucangan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Kedua, aliran pemikiran yang menganggap bahwa perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki merupakan sebuah harmonitas yang saling mendukung antara kelemahan dan kelebihan. Tapi dalam perkembangannya harmoni ini justru menjadi relasi kuasa. Ketiga, aliran yang menganggap bahwa ketidakadilan yang disebabkan oleh peran gender merupakan akibat dari relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan berada pada posisi sekunder sedangkan laki-laki berada diposisi primer.

¹⁵ Lihat Lembaga Studi Realino dalam Cahya Yuana, *Respon Elit Muhammadiyah, Terhadap Dinamika Wanita*, Fisipol UGM, 2000.

¹⁶ Mansour Fakih, *op.cit.*

Konsep lain mengenai gender adalah seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian bekerja di dalam dan luar rumah tangga, seksualitas, tanggungjawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender kita.¹⁷

Aan Oakley membedakan istilah gender dengan istilah seks. Sosiologi dari Inggris ini mengungkapkan bahwa perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis terutama yang menyangkut prokreasi (hamil, melahirkan, dan menyusui). Sedangkan perbedaan gender merupakan perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan seks tetapi tidak terlalu identik dengannya. Perbedaan bahwa perempuan biasanya bertubuh langsing, lembut, emosional sedangkan laki-laki bertubuh kekar, rasional merupakan perbedaan yang bersifat kebiasaan sosial bukan biologis.¹⁸

Seks dan gender dilihat sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan oleh Julia 1 Suryakusuma, meskipun keduanya berbasis biologis. Seks merupakan konstruksi sosial yang bersifat politis, yakni pengorganisasian kedalam kekuasaan yang mendukung dan menghargai individu dan kegiatan tertentu dan pada saat yang sama menekankan dan menghukum yang lainnya. Meskipun demikian, pada kenyataannya konsep gender lebih merupakan ekspresi psikologis dan cultural dari seks yang sifatnya biologis, menjadi peran dan perilaku sosial tertentu : perempuan disektor domestik dan pria disektor publik. Pendapat tersebut semakin

¹⁷ J.C. Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Terj) Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

¹⁸ Lihat dalam Saptri dan Haizner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Yayasan Kalyanamitra, 1997, hal 21.

memperjelas bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki berdasarkan sifat peminim dan maskulin bukanlah sesuatu yang terberi melainkan suatu proses yang melibatkan aspek sosial.

Makna kontroversial atas perbedaan laki-laki dan perempuan pada tahap selanjutnya akan melahirkan perbedaan antara dua jenis kelamin tersebut. Perbedaan jenis kelamin yang mempunyai sifat terberi (*given*) ini kemudian digunakan untuk menyusun suatu kategori sosial yang kemudian digunakan untuk menyusun suatu kategori sosial yang kini kita kenal sebagai Gender. Gender merupakan serangkaian atribut sikap dan perilaku yang dikonstruksi secara sosial yang kemudian menghasilkan dua kategori yang dikotomis sebagai apa yang disebut feminitas yang dilekatkan pada perempuan dan maskulinitas yang diidentikkan dengan laki-laki.¹⁹

E.1.2. Gender dan Budaya Patriarki

Patriarki secara harfiah membuat pengertian sebagai kepemimpinan para ayah (*the rulers father*). Akan tetapi pada perkembangannya makna tersebut telah mengalami pergeseran yang oleh Marla Mies disebutkan :²⁰

“goes beyond ‘the rulers father’, it includes the role husbands, of male bosses, of ruling men in most societal instutions, in politics and economies in short, what has been called ‘the men’s league’ or men’s house.”

Budaya patriarki dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki pada tempat yang lebih tinggi dari pada kaum perempuan, dan keadaan tersebut merembes dalam berbagai dimensi yang ada dalam masyarakat menurut definisi yang diberikan oleh Heidi Hartman patriarki adalah :

¹⁹ *Ibid*

²⁰ May Lan, *op.cit*, hal 14.

“patriarchy is a set of sosial relations which has a material base and which are hierarchical relations between men and solidarity among them which enable them in turn dominate women”

Patriarki merupakan sistem struktur dan praktik sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai kelompok yang mendominasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sebagai sebuah sistem patriarki memiliki dua bentuk yaitu patriarki domestik dan patriarki publik. Patriarki domestik menitikberatkan kerja dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk stereotype yang melekat pada kaum perempuan. Dalam hal ini kerja dalam wilayah domestik merupakan kodrat yang harus dijalankan oleh kaum perempuan yang sifatnya tetap dan harus. Ketika perempuan dikondisikan seperti itu, maka yang terjadi adalah penindasan terhadap mereka. Penindasan terhadap kaum perempuan juga datang dari tempat kerja, budaya, negara, kekerasan. Penindasan terhadap perempuan pada bentuk patriarki ini dilakukan oleh individu yang memegang teguh patriarki. Sehingga bukan suatu hal yang berlebihan bila dalam sistem budaya semacam itu kaum laki-laki berada dalam pihak yang mendominasi, sementara kaum perempuan berada pada pihak yang mengalami penundukan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Akar ketimpangan

yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan tersebut terbagi dalam empat golongan yaitu:²¹

1. Pembagian kinerja secara seksual berlaku universal tetapi tidak selalu berarti dominasi laki-laki.
2. Perempuan termarginalisasi oleh kolonialisme.
3. Bahwa posisi perempuan selalu ter subordinasi dalam bentuk berbeda-beda sesuai dengan sistem yang ada pada saat itu.
4. Subordinasi terdapat pada saat perempuan masih terkungkung dalam lingkup domestik dalam sistem feodal yang masih patriarkhal.

Sistem patriarkhal telah berlangsung selama kurun waktu yang sangat lama. Dan selama itu pula didalam masyarakat berkembang kepercayaan bahwa posisi perempuan mengalami ketimpangan. Selama sistem patriarkhal itu berlangsung, selama itu pula posisi perempuan mengalami ketimpangan sebelum sistem yang sejajar sulit tercapai, sebab bagaimanapun juga dalam kurun waktu yang lama pembedaan gender itu secara biologis telah disosialisasikan secara sosial dan kultural dalam masyarakat berbasis hubungan patriarkhal.

Dikaitkan dengan gender, hubungan simetris atau kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam konteks budaya patriarki ini akan sulit ditegakkan. Dominasi laki-laki ini semakin mempersempit wacana gender. Adanya perbedaan gender menurut Mansour Fakih telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, apalagi ditambah dengan budaya patriarki. Manifestasi dari ketidakadilan tersebut dapat dilihat melalui marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau

²¹ Saptari dan Hotzner, *op.cit.*

angapan tidak penting dalam keputusan, pembentukan stereotype atau pelabeian negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja yang lebih banyak dan lebih panjang. Manifestasi ketidakadilan gender tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis.

E.2. Pers

E.2.1. Pengertian Pers

Pengertian pers dapat dibagi dalam dua bagian yaitu pengertian pers dalam arti luas dan pengertian pers dalam arti sempit. Pers dalam arti luas ialah mencakup semua mass media (media massa), sedangkan pers dalam arti sempit ialah hanya mencakup media cetak saja. Menurut I.Taufik, pengertian pers yaitu :

“...pengertian yang umum tentang pers adalah usaha dan alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat dan penerapan hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang telah atau akan terjadi di sekitarnya berwujud berbentuk dalam surat kabar, bulletin, kantor berita dan lain-lain media yang dicetak atau diusahakan melalui radio, televise, filem dan sebagainya”.²²

Pengertian pers menurut J.C.T. Simorangkir juga dibedakan dalam dua kategori pada yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Dalam arti luas meliputi semua alat-alat komunikasi massa, termasuk filem, radio, dan televisi. Sedangkan pers dalam arti sempit dibatasi hanya pada pers cetak saja.²³

F.Rachmadi dalam tulisannya membagi istilah pers dalam 2 kategori yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti luas mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi dan filem yang berfungsi

²² I. Taufik, *Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia*, PT. Triyindo, 1977, hal 7-8.

²³ J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980, hal 13

memancarkan atau menyebarluaskan informasi berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk pemberitaan yang melewati proses percetakan seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah bulanan dan sebagainya yang dikenal dengan media cetak. Pers dalam pengertian luas merupakan manifestasi dari *freedom of speech* sedangkan dalam pengertian sempit merupakan manifestasi dari *freedom of the press*, yang keduanya tercakup dalam pengertian *freedom of expression*. Definisi pers menurut Oemar Seno Adji ialah sebagai berikut :

“pers dalam arti sempit diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya pers dalam arti luas memasukkan didalamnya semua media massa *communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.”²⁴

Istilah pers dalam pengertian surat kabar (media cetak) berasal dari benua Eropa ketika para pedagang disana saling bertukar informasi mengenai harga pasar yang ditulis pada kulit kayu, setelah ditemukan huruf cetak maka informasi-informasi itu diabadikan melalui percetakan. Surat kabar sebagai salah satu bentuk media cetak memiliki ciri-ciri :

- a) *regular and frequent appearance*
- b) *commodity from, informational countet*
- c) *public sphere function, urban, secular audience*
- d) *relative freedom.*

²⁴ Lihat Oemar Seno Adji, *Pers, Aspek-aspek Hukum*, Jakarta, Airlangga, hal 74.

Surat kabar adalah satu bentuk media pers yang memiliki karakteristik khas karena sifat informasi yang hangat dan senantiasa aktual, surat kabar telah berperan besar sebagai media yang mampu memberikan pemahaman tentang informasi atau dianggap penting oleh publik. Leon sigal mendefinisikan surat kabar sebagai :

“kesatuan antara bentuk konfigurasi atau pola dan isi, lebih dari sekedar memberikaan bentuk dalam arti tata wajah, namun memberikan konfigurasi atau kerangka acuan yang mengandung seuntai nilai-nilai. Nilai itu membangun kerangka pandangan yang menjadi semacam kaca mata bagaimana wartawan melihat suatu kejadian, memberikan makna atau melewati tekanan pada kejadian itu.”²⁵

Surat kabar tidak saja diapndang secara fisik saja, namun lebih ditekankan pada muatan yang dikandungnya yaitu adanya seuntai nilai-nilai. Untaian nilai itulah yang menjadikan surat kabar sebagai benda bermakna, karena mampu membentuk pandangan yang akan membantu membaca memahami suatu kejadian. Kehadiran surat kabar sebagai institusi sosial bagi masyarakat adalah melalui liputan yang dilakukannya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungannya. Dalam liputan inilah surat kabar akan memberikan makna terhadap suatu peristiwa sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Melalui liputan tersebut, surat kabar membantu masyarakat pembancanya memahami suatu kejadian.

²⁵ Lihat dalam Hermin Indah Wahyuni, *Liputan Surat Kabar Indonesia Terhadap Dinamika Politik PP*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM Yogyakarta.

Dalam UU Pokok Pers No.11/1966 yang telah diubah dengan UU No.4/1967 dan disempurnakan lagi dengan UU No.21/1982, menetapkan pada ketentuan umum Pasal 1 bahwa yang dimaksud dalam UU ini, pers adalah:

“Lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu dengan alat-alat milik sendiri, berupa percetakan, alat-alat foto, klise mesin-mesin stensil atau alat-alat tehnik lainnya.”

Dalam Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/PERMEMPEN/1998 tentang ketentuan-ketentuan surat izin usaha penerbitan pers (sebelum Dapertemen Penerangan dilikuidasi pada awal pemerintahan Gus Dur) menyatakan bahwa dengan pers adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan pers adalah surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah, buletien, berkala lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan pers dan penerbitan kantor berita.
- b. Perusahaan pers adalah badan usaha swasta nasional berbentuk badan hukum, koperasi yayasan atau BUMN.
- c. Percetakan pers adalah perusahaan percetakan yang dilengkapi dengan perangkat alat keperluan mencetak penerbitan pers.
- d. Karyawan pers adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan secara bersama-sama dalam satu kesatuan yang menghasilkan penerbitan pers yang terdiri dari pengasuh pers, karyawan pengusaha, wartawan, administrasi dan karyawan pers lainnya.
- e. Pengasuh penerbitan pers adalah pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan pemimpin perusahaan.

E.2.2. Peran dan Fungsi Pers

Peran dan fungsi pers dalam masyarakat memang menunjukkan hal yang signifikan karena pers mempunyai misi atau peranan yang sangat vital yaitu sebagai *agent of change* yang membantu proses peralihan masyarakat tradisional kemasyarakat modern. Pers sebagai *agent of sosial change* memiliki beberapa tugas dalam menunjang pembangunan. F. Rachmadi dalam tulisannya mengatakan Peran Pers antara lain:²⁶

1. Pers dapat memperluas cakrawala pandangan. Melalui Pers orang dapat mengetahui kejadian yang dialami di Negara-Negara lain.
2. Pers dapat memusatkan perhatian khalayak dengan pesan-pesan yang ditulisnya. Dalam masyarakat modern, gambaran kita tentang lingkungan yang jauh diperoleh dari Pers dan Media masa yang lainnya. Masyarakat mulai menggantungkan pada pers dan media masa.
3. Pers mampu menumbuhkan aspirasi. Dengan penguasaan media, suatu masyarakat dapat mengubah kehidupan mereka dengan cara meniru apa yang disampaikan oleh media tersebut.
4. Pers mampu menciptakan suasana membangun. Melalui pers dan media masa dapat disebarluaskan informasi kepada masyarakat. Ia dapat memperluas cakrawala pemikiran, memusatkan perhatian pada tujuan pembangunan sehingga tercipta suasana pembangunan yang serasi dan efektif.

²⁶ F. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.

Selain itu, pers ikut berperan aktif sebagai penyalur informasi yang menyebarkan ideologi pada masyarakat. Seperti yang dikatakan Denis McQuail.²⁷

“the fact that people learn from the media, the fact that media try to inform people, the fact that the media are supposed to inform the people.”

Tejalannya komunikasi antara berbagai pihak tidak lain karena adanya media. Manusia dalam bermasyarakat selalu membutuhkan informasi yang tepat sebagai modal untuk bertindak. Elemen komunikasi seperti yang disebutkan oleh Jay dan Whitney dari sender sebagai sumber, sejumlah audiens sebagai penerima dan adanya channel yaitu media atau dalam hal ini pers. Menurut Denis McQuail pers berfungsi memelihara nilai-nilai dalam masyarakat, sehingga fungsional terhadap sistem sosial. Seperti yang dikatakan Deffler, media massa dapat mengguhkan norma-norma budaya dengan informasi-informasi yang disampaikan. Pers juga dapat mengaktifkan perilaku-perilaku tertentu, apabila sistem informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan individu serta tidak bertentangan dengan norma budaya yang berlaku. Pers berperan penting untuk masyarakat dalam melakukan:²⁸

1. Informasi

- a. Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dunia.
- b. Memudahkan inovasi, adaptasi dan kemajuan.

²⁷ Yulia Hendrika, *Konflik Media dan Masyarakat di Indonesia*, Fisipol UGM, 2001, hal 7

²⁸ *Ibid*, hal 10

2. Korelasi
 - a. Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
 - b. Membentuk kesepakatan
 - c. Menunjang otoritas dan norma-norma yang manapun
 - d. Melakukan sosialisasi
 - e. Mengkoordinasikan beberapa kegiatan
3. Kesenambungan
 - a. Mengeksperikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan
 - b. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai
4. Hiburan
 - a. Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana rekreasi
 - b. Meredakan ketegangan sosial
5. Mobilisasi

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan sebagai media komunikasi massa pers juga memiliki fungsi dalam struktur sosial, sebagai bagian dari mekanisme sosial yang menjalankan fungsinya dengan jalan menyampaikan informasi. Oleh sebab itu sifat pers sebagai institusi sosial dapat dilihat dari fungsinya dalam masyarakat. Wilbur Schram mengatakan secara umum fungsi pers termasuk media sebagai alat penyebar gagasan, cita-cita serta pikiran manusia. Ada tiga fungsi mendasar dari pers yaitu:²⁹

²⁹ Wilbur Schram dalam F. Rachmadi, *op.cit*, hal 109.

1. Member Informasi

Informasi yang diberikan pers adalah informasi yang obyektif mengenai apa yang terjadi.

2. Mengulas berita-berita dan membawa perkembangan menjadi focus atau sorotan.
3. Menyediakan jalan bagi orang yang akan menjadi barang dan jasa untuk memasang iklan

Fungsi Pers secara lebih rinci ada empat yaitu :³⁰

1. Fungsi Mendidik

Fungsi ini sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa karena tidak sedikit bantuan yang disampaikan dalam menunjang pendidikan masyarakat. Fungsi pendidikan pers ditunjukkan dengan adanya sumbangan dalam menambah pengetahuan dan kedalaman pemikiran bagi masyarakat. Menurut Mott, fungsi pendidikan pers tampak besar pengaruhnya ketika berita yang disampaikan merupakan penyiaran pemikiran dari pakar ilmu pengetahuan atau kaum profesional, sehingga *the members of community are better informed and more skillfull in their approach to life.*

2. Fungsi Menghubungkan

Dalam hal ini pers berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

³⁰ May Lan, *Pers Negara dan Perempuan*, Yogyakarta, Kalika, 2002, hal 2.

3. Sebagai Penyalur Dan Pembentuk Pendapat Umum

Pers tidak hanya menyajikan berita atau informasi tetapi juga menurut pemikiran-pemikiran, pandangan atau opini orang, sehingga pers mempunyai sifat sebagai *organ of public information and opinion dan sebagai organ of public opinion*.

4. Fungsi Kontrol Sosial

Kekuatan utama dari pers ialah sebagai alat kontrol sosial yang terletak pada fungsinya sebagai pengawas lingkungan pelaksanaan fungsi kontrol sosial oleh pers sebagian ditujukan kepada pemerintah dan aparatnya.

E.2.3. Politik Keredaksian Pers

Penerbitan pers tidak bisa dilepaskan dari peranan organisasi keredaksian. Dalam kamus besar bahasa indonesia³¹, yang dinamakan keredaksian atau yang lebih dikenal dengan redaksi adalah badan (pada persuratkabaran) yang bertugas memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan kedalam surat kabar. Sedangkan politik keredaksian merupakan proses pengambilan keputusan dalam sebuah badan redaksi.³² Pengambilan keputusan dalam keredaksian tersebut adalah dalam hal memilih dan menyusun tulisan atau berita yang akan disajikan, jadi sebelum tulisan-tulisan atau berita dicetak terlebih dahulu ada pemilihan mana tulisan/berita yang layak dicetak atau tidak. Pemilihan atau penyusunan tersebut merupakan tugas dari dewan redaksi. Penerbitan pers merupakan perpaduan dari berbagai bidang yang saling terkait antara lain bidang keredaksian, percetakan serta usaha. Penerbitan pers apakah itu dalam bentuk surat kabar, majalah, tabloid,

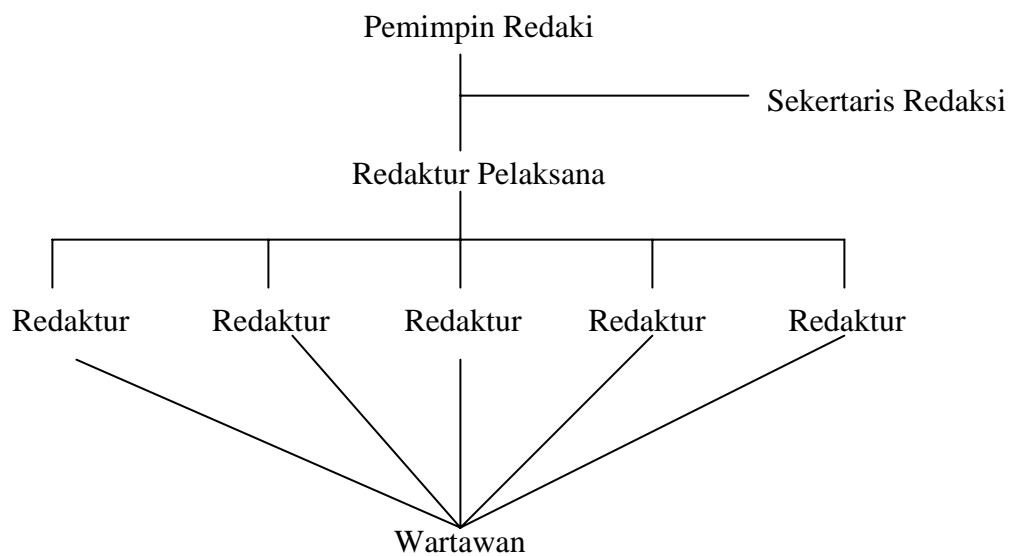
³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

³² Fahmi Hidayat, *Citra Perempuan dan Laki-laki dalam Poto Berita*, Yogyakarta, Fisipol UGM,

bulletin atau buku merupakan produk ideologi yang memiliki misi tertentu. Oleh karena itu, dalam sebuah penerbitan pers pasti melibatkan banyak personil untuk menuangkan segala ide dan gagasan yang tujuannya ialah menghasilkan produk penerbitan yang berkualitas.³³ Keredaksian dalam penerbitan pers merupakan instrument yang penting seperti diketahui bahwa redaksi adalah penanggung jawab berita dari berita yang disajikan. Kegiatan keredaksian secara umum meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus, penentuan topik, penentuan headline, penentuan berita terbuka (*opening news*). Dari kegiatan keredaksian semacam ini, maka dapat dikatakan bahwa baik dan buruk isi pemberitaan tergantung dari ketajaman pemimpin redaksi dan dewan redaksi dalam mencari dan memilih materi pemberitaannya. Secara umum, struktur keredaksian dalam penerbitan pers adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Keredaksian



³³ Totok D. *op.cit.*

E.3. Gender dalam Pers

Penggambaran perempuan dalam dunia pers telah banyak mendapat perhatian dari berbagai kajian studi. Berbagai studi tersebut, umumnya mengacu pada studi barat dan hasilnya menunjukkan bahwa wanita ideal adalah pasif, dan berada dalam lingkungan domestik. Selain itu dalam studi tersebut juga berhasil diungkap mengenai penggambaran perempuan yang hanya dijadikan objek. Perempuan dijadikan objek dalam rangka peningkatan oplah media. Kondisi perempuan secara umum dalam media dikemukakan dalam *Abuse of Women in the media* (sebuah buku kecil yang dikeluarkan lembaga konsumen penang, Malaysia tahun 1982) :

“in the media women are portrayed as the inferior lesser half of humanity, and as object of sexual pleasure. Even worse, marketing strategis have helped to reinforce the fantasies that beguile woman into accepting their role as ornaments of beauty and sensuality which degrades and denies women of their self respect, dignity and their humanity.”³⁴

Ketika perempuan dijadikan objek dalam penerbitan pers, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dengan industri atau kapitalisme. Media dalam hal ini pers merupakan media yang bershabat dengan kepentingan kalangan bisnis, disatu sisi industry sendiri memiliki kepentingan dengan sendiri dan disisi yang lain ia sangat bergantung pada kalangan bisnis non media. Fenomena liputan pers yang *male centered* pada level tertentu menentukan justifikasinya mengingat sebagian orang yang terjun dalam pers adalah laki-laki. Dalam penelitian Sue Alexander 1994 mengungkapkan bahwa 104 reporten yang meliput adalah laki-laki dan hanya ada

³⁴ Ade Armando, *Wanita Sebagai Objek Seksual dalam Media, Komponen Penting dalam Pembentukan Kultur Single*, dalam *Wanita dan Media*, Bandung, Rosdakarya, 1998, hal 159.

satu perempuan. Dalam study Park Yong Sang tahun 1987, perbandingan antara reporter/editor perempuan dan laki-laki di Korea Selatan adalah 1:9. Di Amerika Serikat, praktisi perempuan dalam industri pers hanya 30,9%.³⁵

Dalam kondisi rendahnya partisipasi perempuan di Dunia Pers adalah wajar apabila konsep *newsworthiness* (definisi bernilai tidaknya suatu berita) datang dari pihak yang berkuasa. Layak atau tidaknya suatu berita untuk dimuat atau dicetak atau memang tergantung dari keredaksian. Dan tidak semua orang yang bekerja di pers mempunyai wewenang sebagai Pengambil Keputusan atau Mempunyai Posisi Dalam Politik Keredaksian. Ada kebijakan dari media dalam hal ini surat kabar dalam menjalankan mekanisme pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi perempuan di Dunia Pers menyebabkan perempuan yang terlibat dalam politik keredaksian sedikit pula. Dari kondisi tersebut yang terjadi kemudian ialah banyak perempuan yang bekerja dalam Pers tidak memiliki kekuatan politis dalam politik keredaksian atau penggolongan berita.

Menurut Debra Yatim, pekerja media adalah manusia yang tunduk pada kekuasaan eksternal (pemilik modal) dan kekuatan internal (semacam “tradisi” untuk selalu mengutamakan kaumnya). Dominasi laki-laki sebagai praktisi media akan membawa bias dalam liputan maupun penayangan berita. Bias dalam liputan akan menjadikan kaum perempuan ter subordinasi dalam media. Kaum perempuan yang bekerja dalam keredaksianpun akan hanya diberi tugas untuk memegang pos yang lunak atau soft news seperti hiburan, iptek dan lain-lain. Pos-pos yang keras seperti politik, kriminal tetap dipegang oleh kaum laki-laki.

³⁵ Fahmi Hidayat, *op.cit.*

Media termasuk di dalamnya penerbitan pers dapat diupamakan cermin bagi realitas yang beredar dalam masyarakat. Media menurut Debra Yatim mempunyai hubungan dua arah dengan realitas sosial. Disatu pihak, media jadi cermin bagi keadaan di sekelilingnya dan dilain pihak media membentuk realitas sosialnya sendiri. Lewat sikapnya yang selektif dalam memilih hal-hal yang ingin diungkapkannya, dan juga cara menyajikan hal-hal tersebut, media memberikan interpretasi, bahkan membentuk realitasnya sendiri. Termasuk di dalam interpretasi selektif ini yakni pengukuhan nilai, sikap serta pola-pola perilaku masyarakat. Hal ini dipertegas dengan sudut pandang bahwa pria adalah penentu kebijakan dalam masyarakat termasuk juga dalam politik keredaksian pers. Sementara itu perempuan tetap berada dalam wilayah feriperial. Posisi perempuan dalam pers masih stereotype. Ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai pandangan masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki. Sehingga dengan sendirinya pandangan itu akan tercermin di dalam struktur keredaksian pers. Pekerja perempuan yang berkecimpung dalam pers kurang lebih hanya sepertiga dari jumlah seluruh pekerja atau sekitar 461 wartawan perempuan dari 4687 wartawan pria (merupakan data dari PWI). Posisi kerja dari sejumlah perempuan dalam bidang itupun tidak selalu sebagai pengambil keputusan.

Dalam sejumlah studi tentang eksistensi dan posisi perempuan dalam struktur organisasi keredaksian surat kabar harian di Indonesia dikemukakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dikritisi, pertama, mengenai jumlah jurnalis perempuan yang hingga kini hanya berkisar antara 5 sampai 15% dari seluruh penerbitan pers harian yang terkemuka di Indonesia jumlah ini membawa

konsekuensi pada lemahnya *bargaining position* maupun pada peran strateginya. Kedua, kebanyakan jurnalis perempuan tersebut masih berada pada level bawah dalam struktur hierarki kerja keredaksian pers. Ketiga, pembagian kerja keredaksian yang eksis dimana jurnalis perempuan lebih banyak ditempatkan pada liputan-liputan yang stereotype perempuan atau masalah-masalah yang dianggap lunak.³⁶ Meskipun daya kritis masyarakat amat tinggi terhadap peran media massa dalam mensosialisasikan ideologi gender, tetapi berbagai problem gender di dalam struktur organisasi kerja keredaksian belum banyak diperhatikan secara serius, baik oleh pihak pers sendiri maupun dari kalangan pekerja pers perempuan. Ada anggapan bahwa hierarki dari organisasi keredaksian pers cenderung bersifat maskulin, oleh karena sifatnya yang *top down* dan hierarkis. Dalam keredaksian pers laki-laki cenderung mendominasi dan perempuan yang dimarginalkan. Orientasi pers sangat dipengaruhi oleh bagaimana visi dan persepsi atau orientasi etis para pengelola penerbitan pers. Kurangnya kesadaran gender dan sensitive gender dikalangan pengelola penerbitan pers melahirkan pemberitaan yang bias gender atau setidaknya banyak peristiwa atau persoalan yang sensitive gender dalam masyarakat terluput dari perhatian para penulis berita maupun ketika menentukan angle tulisannya.³⁷

Menurut Ashadi Siregar orientasi penerbitan pers juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana komposisi laki-laki dan perempuan dalam instansi pers. Dominannya kaum laki-laki dalam pengelolaan penerbitan pers akan mempengaruhi bagaimana tampilan perempuan dalam wacana berita, meskipun

³⁶ Ashadi Siregar, *Organisasi Keredaksian Surat Kabar Indonesia dalam Perspektif Gender*, dalam op.cit.

³⁷ Lihat Ashadi Siregar, *Media dan Gender*, Bandung, Rosdakarya, 1998, hal 10.

sebenarnya komposisi yang didominasi kaum perempuan juga tidak menjamin keberadaan wacana berita perempuan yang sensitive gender. Faktor komposisi antara laki-laki dan perempuan ini kemudian dapat melahirkan struktur dan sistem pembagian kerja jurnalisme serta pola pendelegasian tugas keredaksian yang cenderung maskulin. Dalam hal ini kaum laki-laki cenderung mendominasi posisi strategi dalam organisasi kerja dimulai dengan jabatan seperti pemimpin redaksi, redaktur. Berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil lebih sering sarat dengan kepentingan dominan yakni kaum laki-laki dalam konteks ini perempuan bisa menjadi apa yang dikatakan sebagai *muted group* (kelompok bisu) dalam keredaksian pers.³⁸ Ada berbagai macam faktor mengapa penggambaran tentang perempuan dalam media dalam hal ini pers masih belum menggembirakan.³⁹ pertama, media pada dasarnya adalah cermin dan refleksi dari masyarakat secara umum. Jika perempuan dalam suatu masyarakat masih sebagai objek dan belum bisa mengambil keputusan, maka gambaran itulah yang akan dipaparkan media. Kedua, pers pada dasarnya cenderung mengangkat hal-hal yang menarik dalam masyarakat. Ini pada gilirannya membuat pers meliput orang-orang yang berpengaruh dalam bidang-bidang yang notabene didominasi oleh kaum pria. Ketiga, pers masih didominasi oleh pria. Meskipun demikian, masa depan proyeksi media tentang perempuan memperlihatkan hal-hal yang menggembirakan, yang ditandai hal-hal sebagai berikut, pertama semakin banyaknya perempuan yang menjadi sumber berita menarik, bukan karena ia perempuan tapi karena ia unggul dalam bidang yang ditekuninya seperti politik,

³⁸ *Ibid*, hal 11.

³⁹ Disarikan dari Marwahdaud Ibrahim, *Perempuan dan Komunikasi*, dalam *Ibid*, hal 106.

sains dan teknologi, sastra, seni dan sebagainya. Kedua, semakin banyak perempuan yang terjun ke dalam dunia pers.

F. Definisi Konsepsional

1. Posisi berarti kedudukan atau pangkat.
2. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya.
3. Pers dalam hal ini adalah lembaga kemasyarakatan sebagai alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya. Dari definisi ini kemudian mengarah pada pers dalam arti sempit yakni media cetak berupa surat kabar untuk menyampaikan pesan/berita, pikiran, perasaan dan gagasan kepada umum.
4. Politik keredaksian adalah proses pengambilan keputusan dalam sebuah badan redaksi yaitu badan (pada persuratkabaran) yang bertugas memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar/penerbitan pers.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi Operasional ini merupakan batasan yang akan dilakukan peneliti terhadap Gender dalam politik keredaksian pers maka penelitian ini melihat dari indikator sebagai berikut:

1. Komposisi perempuan dan laki-laki dalam struktur organisasi keredaksian.
2. Proses rekrutmen dan seleksi dalam keredaksian pers.
3. Pembagian tugas/pekerjaan dalam keredaksian.

4. Posisi dan peran perempuan dalam struktur organisasi keredaksian.
5. Kesadaran gender dalam organisasi keredaksian pers.
6. Motivasi perempuan bergabung atau bekerja dalam pers.

H. Metodologi Penelitian

Kajian ilmu sosial terhadap suatu fenomena sosial sudah tentu membutuhkan kecermatan metodologi. Menurut Afan Gaffar metodologi adalah merupakan suatu studi tentang rencana-rencana yang akan digunakan untuk memperoleh pengetahuan, atau dengan kata lain, metodologi adalah ilmu yang mempelajari rencana-rencana yang mungkin dijalankan sehingga dengan demikian pemahaman atas gejala-gejala dapat diperoleh.⁴⁰

Sebagai suatu ilmu tentang metode atau cara kerja, maka metodologi adalah pengetahuan tentang cara mengkonstruksi bentuk dan instrument penelitian. Konstruksi teknik dan instrument yang baik dan benar akan mampu menghimpun data secara obyektif, lengkap dan dapat dianalisis untuk memecahkan masalah.

H.1. Pemilihan Metode Penelitian

Berangkat dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian maupun kerangka dasar teori diatas, penelitian ini mempunyai tujuan metodologis, yaitu melukiskan (deskripsi). Maka dari itu konsep-konsep yang telah direkonstruksi di depan tidak akan diuji (verifikasi) kebenarannya, melainkan hanya ditempatkan secara longgar sebagai alat analisis. Penelitian deskriptif adalah langkah-langkah melakukan reinterprestasi obyektif tentang fenomena-fenomena sosial yang

⁴⁰ Afan Gaffar, *Dua Tradisi Keilmuan*, Fisipol UGM. Yogyakarta. hal 2.

terdapat dalam permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, pertama adalah untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu. Hasilnya kemudian dicantumkan kedalam table-tabel frekuensi. Kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu, umpamanya intraksi sosial, sistem kekerabatan dan lain-lain. Penelitian seperti ini biasanya dilakukan tanpa hipotesa yang telah dirumuskan secara ketat. Dengan kata lain, penelitian ini tidak diuji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan, membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai keadaan saat ini.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian deskriptif ini merupakan prosedur penelaahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) atau peristiwa pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini merupakan langkah-langkah melakukan representasi obyektif tentang gejala-

gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki.⁴¹ Ciri-ciri pokok penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah :

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat faktual.
2. Mengambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi nasional yang *adequat* (memadai).

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertentu pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena itu, pada tahap ini metode deskriptif tidak boleh daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*fact finding*).⁴² Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek yang diselidiki itu. Pada tahap berikutnya metode ini harus diberi bobot yang lebih tinggi, karena sulit untuk dibantah bahwa hasil penelitian yang sekedar mendeskripsikan fakta-fakta tidak banyak artinya. Untuk itu pemikiran-pemikiran di dalam metode ini perlu di kembangkan dengan memberikan penafsiran yang *adequat* atau memadai terhadap fakta-fakta yang ditentukan. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan menyusun data, tetapi juga analisa dan interpretasi tentang arti data.

Menurut Whitney, metode deskripsi adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi

⁴¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada Perss, hal 67.

⁴² *Ibid*, hal 62-63.

tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, penelitian bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu standar atau suatu studi komparatif. Adakalanya penelitian mengadakan klarifikasi serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menanamkan metode deskriptif inidengan nama survei normatif. Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor yang lain. Karenanya, metode deskriptif juga dinamakan studi kasus.⁴³

Mohammad Nasir memberikan pengertian penelitian deskriptif ialah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan rehabilitas. Analisisnya dikerjakan berdasarkan “ Expost facto”, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung.⁴⁴

Penelitian deskriptif yang diterapkan untuk kepentingan skripsi ini adalah bentuk penelitian yang biasa dilakukan oleh ilmuan sosial. Dalam banyak kasus, penelitian ini juga merupakan studi awal atau yang bersifat eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi mandiri dengan tujuan menggambarkan sistem sosial, hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa sosial, memberikan informasi

⁴³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1983, hal 63-64.

⁴⁴ *Ibid*, hal 105.

latar belakang mengenai isu-isu yang ditanyakan sekaligus menstimulasi penjelasan-penjelasan tentang fokus penelitiannya.

H.2. Jenis Penelitian

Studi ini pada dasarnya bertumpu pada penelitian kualitatif. Aplikasi penelitian kualitatif ini adalah konsekuensi metodologi dari penggunaan metode deskriptif. Bogdan dan Taylor mengungkapkan bahwa “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁵ penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses penjarangan informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa penelitian kualitatif bersifat induktif, karena tidak dimulai dari hipotesa sebagai generalisasi untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus.

Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Masalah yang akan diungkapkan dapat disiapkan sebelum mengumpulkan data atau informasi, akan tetapi mungkin saja berkembang dan berubah selama kegiatan penelitian dilakukan. Dengan demikian data atau informasi yang dikumpulkan dapat terarah pada kalimat yang diucapkan, kalimat yang tertulis atau tingkah laku kegiatan yang nampak. Informasi dapat dipelajari dan ditafsirkan dengan usaha memahami maknanya

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hal 3.

sesuai sudut pandang sumber datanya. Makna informasi yang bersifat khusus itu dalam bentuk teoritis melalui proses penelitian kualitatif tidak mustahil akan menghasilkan teori-teori baru, tidak sekedar untuk kepetingan praktis saja.

H.3. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perempuan dalam Keredaksian Pers yang ada di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Alasan mengapa memilih perempuan dalam keredaksian pers ialah karena perempuan selalu menjadi topik yang menarik untuk di bicarakan atau diperbincangkan dalam berbagai kalangan. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa topik tentang perempuan menarik untuk diperbincangkan. Selain hal tersebut juga dikarenakan bahwa posisi perempuan dalam keredaksian masih adanya ketidakseimbangan atau berada pada posisi inferior. Berhubungan dengan hal diatas, yang terjadi kemudian dijadikan sebagai analisa ialah orang-orang yang bekerja di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dalam hal ini redaksi merupakan orang-orang yang mampu menulis berita (berkarya). Inilah yang merupakan faktor utama dalam bekerja di keredaksian surat kabar. Jadi, dalam surat kabar yang lebih dipentingkan ialah kemampuan atau menulis (berkarya). Berangkat dari keberadaan perempuan tersebut di atas, maka pilihan atas Kedaulatan Rakyat sebagai unit analisis untuk melihat dan mengetahui Posisi Perempuan Dalam Pers Indonesia.

H.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data antara lain wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentary*). Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi yang diterapkan dalam studi ini ialah dengan mengumpulkan berbagai bahan, data, literatur dan tulisan tersebar lainnya yang berhubungan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter yaitu pengamatan terhadap gejala-gejala obyek yang diteliti dengan meneliti dokumen-dokumen yang tersedia.

Tatang M. Arifin mengatakan bahwa "data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian".⁴⁶ Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data, karena data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni berkaitan dengan penelitian. Dalam suatu penelitian disamping menggunakan metode yang tepat, diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh terhadap obyektifitas hasil penelitian. Mempertimbangkan hal tersebut dan keharusan memenuhi validitas dan realibilitas dalam teknik pengumpulan datanya, maka penelitian ini akan digunakan dokumentasi atau documenter sebagai alat pengumpul datanya. Teknik ini adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip

⁴⁶ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, Rajawali Perss, 1990, hal 130.

dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen-dokumen tersebut tentunya berkisar pada masalah-masalah perempuan dalam dunia pers.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan melalau komunikasi melalui kontak/hubungan pribadi antara pewawancara (interview) dengan yang diwawancarai. Wawancara adalah bentuk menanyakan dengan karakteristik menggunakan pertanyaan verbal untuk menghindari bias dan distorsi serta dihubungkan dengan pertanyaan penelitian yang spesifik serta tujuan yang spesifik pula pada penelitian ini digunakan wawancara tidak terstruktur dan terstruktur yang menggunakan interview guide (panduan wawancara). Informasi serta penjelasan mengenai posisi perempuan dalam politik keredaksian pers akan diperoleh melalui wawancara dengan praktisi pers di surat kabar *Kedaulatan Rakyat*.

Adapun responden yang diwawancarai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Octo Lampito. Alasan mewawancarainya dikarenakan Octo Lampito memiliki jabatan yang sangat strategis sebagai pimpinan redaksi di surat kabar harian *Kedaulatan rakyat*.
2. Dra Hj Fadmi Sustiwi. di redaksi *KR* atau *Kedaulatan Rakyat*. Alasannya mewawancarainya karena Fadmi memiliki jabatan struktural sebagai redaktur di dalam surat kabar harian *Kedaulatan rakyat*.

3. Dra Esti Susilarti MPd. di redaksi *KR* atau *Kedaulatan Rakyat*. Alasannya mewawancarainya karena Esti memiliki jabatan struktural sebagai redaktur di dalam surat kabar harian *Kedaulatan rakyat*.
4. Hanik Atfiati. di redaksi *KR* atau *Kedaulatan Rakyat*. Alasannya mewawancarainya karena memegang jabatan di bagian keluarga atau redaktur keluarga.
5. Dwi Astuti di redaksi *KR* atau *Kedaulatan Rakyat*. Alasannya mewawancarainya karena memegang jabatan sebagai wartawan.

H.5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyusunan data agar dapat ditapsirkan. Penyusunan data berarti menggolongkan ke dalam pola, tema atau kategori. Melakukan analisis data merupakan pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisa data memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Lagipula tidak ada tata cara tertentu yang dapat dilakukan untuk mengadakan analisis, sehingga setiap penelitian harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis akan menginterpretasikan data dan informasi untuk kemudian disusun menjadi sebuah deskripsi yang menjelaskan mengenai posisi perempuan dalam politik keredaksian pers di *Kedaulatan Rakyat*.

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu penelitian kualitatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- a. Pengumpulan data
- b. Penilaian data
- c. Penafsiran data
- d. Penyimpulan data

Mengacu pada langkah-langkah tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan ialah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah pengumpulan data dirasa cukup, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap keabsahan data tersebut. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu:⁴⁷

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)
2. Keteralihan (*transferability*)
3. Kebergantungan (*dependability*)
4. Kepastian (*confirmability*)

Setelah melaksanakan penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penafsiran terhadap data tersebut. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada data, menjelaskan pola dan mencari hubungan lebih menggambarkan perspektif atau pandangan dari penulis, bukan kebenaran mutlak. Sedangkan untuk menguji perspektif ini agar bisa

⁴⁷ *Ibid.*

mengarah kepada kebenaran, maka akan dilakukan dengan metode *chek and recheck* yaitu dengan melakukan *cross-checking* antara data yang berarti mengkonfrontir data atau argumentasi-argumentasi empiris yang saling bertentangan untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang *adequate* atau dalam hal ini analisis data sudah dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung karena cara ini memberikan kesempatan pada peneliti untuk memikirkan lebih cermat data mana yang paling relevan dan dibutuhkan serta strategi pengumpulan data yang tepat. Sedangkan langkah terakhir dari peneliti ini adalah membuat suatu kesimpulan terhadap penafsiran tersebut. Hal ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul, dinilai dan ditafsirkan.